

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan pemerintah, hal ini ditandai dengan diberlakukannya otonomi daerah yang sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang juga direvisi dengan disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Dalam era otonomi ini, daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kemandirian (keuangan) untuk membiayai berbagai belanja daerah. Ketergantungan pembiayaan terhadap pemerintahan pusat harus semakin berkurang, seiring dengan naiknya tingkat kemandirian daerah (Adi, 2007). Adanya kewenangan yang lebih luas ini tentu saja memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengoptimalkan potensi lokalnya sehingga pada gilirannya kemampuan keuangan daerah menjadi lebih baik (Susilo dan Adi, 2007). Penelitian terkait dengan

otonomi daerah yang menggunakan parameter terkait kinerja keuangan daerah merupakan penelitian akuntansi sektor publik.

Adanya tuntutan yang tinggi terhadap kinerja pemerintahan daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintahan daerah. Untuk menilai kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran. Isi dari Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas jumlah pendapatan, belanja, dan pengeluaran daerah selama 1 periode. Dengan melihat Laporan Realisasi dapat dilihat upaya pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Pada bagian pendapatan dapat dilihat upaya pemerintah dalam memperoleh dana dari sumber-sumber pendapatan. Pada bagian belanja dapat dilihat upaya pemerintah dalam mengalokasikan belanja yang ada.

Berdasarkan sisi pendapatan, ada dua pengukuran kinerja yaitu pertumbuhan pendapatan yang menggambarkan bahwa kinerja pemerintah dalam memperoleh pendapatan mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya dan rasio derajat desentralisasi yang menggambarkan tingkat kemandirian daerah. Sedangkan dari sisi belanja ada dua pengukuran juga, yaitu pertumbuhan belanja yang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun dan rasio keserasian belanja yang menggambarkan keseimbangan antar belanja. Sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia cita-cita utama bangsa indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, diharapkan dari pengelolaan pendapatan dan belanja yang ada dialokasikan dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diwakili dengan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). IPM mengartikan definisi kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar Pendapatan Domestik Bruto (PDB). IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia; yaitu panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP, penghasilan). Penelitian ini memiliki konsep yang sama dengan Permoni (2009) mengenai kinerja keuangan yang dihubungkan dengan IPM. Pada penelitian tersebut objek yang digunakan adalah kota Surabaya, sedangkan penelitian ini ingin lebih luas dengan objek kota/kabupaten di Jawa Timur dengan rentang waktu yang lebih panjang.

Dengan adanya pengukuran rasio kinerja terkait IPM tidak hanya bermanfaat untuk pemerintah tetapi juga bagi dunia bisnis. Hal ini dikarenakan IPM dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang

merangsang iklim bisnis dalam suatu daerah tersebut. Peningkatan iklim bisnis akan menumbuhkan investasi yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana PAD tersebut akan menunjukkan kemandirian suatu daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Permoni (2009) yang hanya menguji pada kota Surabaya saja. Pada Hamzah (2007) melihat pengaruh kinerja keuangan dengan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Sedangkan penelitian ini menguji pada kota/kabupaten di Jawa Timur dan menggunakan variabel IPM. Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi di Pulau Jawa. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengambil topik mengenai pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan melakukan studi pada 38 kota/kabupaten di Jawa Timur tahun 2005-2007.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan pendapatan daerah terhadap IPM pada kota/kabupaten di Jawa Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh rasio derajat desentralisasi terhadap IPM pada kota/kabupaten di Jawa Timur?

3. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan belanja daerah terhadap IPM pada kota/kabupaten di Jawa Timur?
4. Apakah terdapat pengaruh rasio keserasian belanja daerah terhadap IPM pada kota/kabupaten di Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh pertumbuhan pendapatan daerah terhadap IPM pada kota/kabupaten di Jawa Timur.
2. Menguji pengaruh rasio derajat desentralisasi terhadap IPM pada kota/kabupaten di Jawa Timur.
3. Menguji pengaruh pertumbuhan belanja daerah terhadap IPM pada kota/kabupaten di Jawa Timur.
4. Menguji pengaruh rasio keserasian belanja daerah terhadap IPM pada kota/kabupaten di Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik
Membuktikan bagaimana pengaruh kinerja pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan pemerintahan daerah kota dan kabupaten di Jawa Timur dapat menggunakan penelitian ini untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan tujuan pemerintah. Salah

satu tujuan dari pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

1.5. Sistematika Skripsi

Dalam penelitian ini, sistematika yang disusun adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab awal ini menguraikan mengenai tuntutan peningkatan kinerja pemerintahan daerah sebagai wujud dari otonomi daerah yang merupakan latar belakang diungkapkannya permasalahan-permasalahan yang ingin dijawab melalui analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Timur dan melihat hubungan kinerja tersebut dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diwakili dengan IPM.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang dipakai sebagai acuan untuk penelitian ini. Bab ini juga menguraikan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang terdiri dari pengertian keuangan pemerintah daerah yang mencakup APBD beserta komponen-komponennya, kinerja keuangan pemerintah daerah, IPM, dan kaitan antara kinerja keuangan daerah dengan IPM. Selain itu dalam bab ini juga menguraikan hipotesis penelitian, rerangka berpikir dan model analisis ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai obyek penelitian, yakni gambaran obyek penelitian dan arah dan kebijakan keuangan daerah. Deskripsi data menjabarkan mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah kota/kabupaten di Jawa Timur Tahun 2005-2007, juga data mengenai IPM kota/kabupaten di Jawa Timur Tahun 2005–2007. Melalui data yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran dan IPM akan dilihat kecenderungan kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan Pemerintah kota/kabupaten di Jawa Timur. Data yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran akan diukur dengan menggunakan rasio kinerja untuk pemerintah daerah, yang terdiri dari pertumbuhan pendapatan, derajat desentralisasi, pertumbuhan belanja, dan rasio keserasian belanja. Hasil daripada analisis tersebut kemudian akan diuji dengan menggunakan analisis regresi untuk melihat ada atau tidak ada pengaruhnya terhadap IPM.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab yang terakhir ini menjelaskan simpulan yang didapat dari penelitian ini, sehingga diperoleh saran–saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya dan bagi obyek yang diteliti.